

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Urbanisasi merupakan salah satu fenomena demografis dan sosial-ekonomi yang sangat dominan dalam perkembangan masyarakat modern. Secara konseptual, urbanisasi diartikan sebagai proses meningkatnya proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, baik akibat perpindahan penduduk dari daerah perdesaan ke perkotaan, perubahan status wilayah dari desa menjadi kota, maupun perluasan wilayah perkotaan itu sendiri. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan mobilitas penduduk, tetapi juga mencerminkan transformasi struktural dalam perekonomian, dari yang semula berbasis sektor agraris menuju sektor industri dan jasa. Dengan demikian, urbanisasi menjadi indikator penting dalam menilai tingkat perkembangan suatu wilayah, karena berkaitan erat dengan perubahan pola produksi, distribusi pendapatan, serta struktur sosial masyarakat.

Dalam ranah global, urbanisasi telah menjadi ciri utama pembangunan di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Kota-kota besar umumnya menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas, akses pendidikan yang lebih baik, serta ketersediaan infrastruktur dan layanan publik yang lebih memadai dibandingkan wilayah perdesaan. Kondisi ini menjadikan wilayah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus magnet bagi penduduk untuk berpindah dari desa ke kota (Saputra & Darmawan, 2023). Oleh karena itu, urbanisasi tidak hanya dipandang sebagai fenomena kependudukan semata,

tetapi juga sebagai bagian dari proses pembangunan yang kompleks dan multidimensional.

Di Indonesia, proses urbanisasi mengalami percepatan yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama di Pulau Jawa yang merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa persentase penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan meningkat secara drastis, dari sekitar 14,6% pada tahun 1960 menjadi hampir 60% pada tahun 2024 (Qodhari & Khudhori, 2024). Selain itu, jumlah penduduk urban juga mengalami peningkatan yang sangat pesat, dari sekitar 12,9 juta jiwa pada tahun 1960 menjadi 167,8 juta jiwa pada tahun 2024, atau meningkat lebih dari 13 kali lipat (Statbase, 2024). Peningkatan ini menunjukkan bahwa urbanisasi di Indonesia tidak hanya mencerminkan pertumbuhan jumlah penduduk kota, tetapi juga perubahan struktur ekonomi dan spasial yang semakin terpusat di wilayah perkotaan.

Salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam mendorong urbanisasi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral. PDRB sektoral mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, industri, dan jasa, dalam suatu wilayah. Semakin tinggi kontribusi sektor-sektor produktif, khususnya sektor industri dan jasa, maka semakin besar pula peluang kerja dan tingkat pendapatan yang dapat ditawarkan kepada masyarakat. Hal ini menjadikan wilayah dengan PDRB tinggi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu menarik arus migrasi penduduk dari daerah perdesaan ke perkotaan (Rahmadana, 2023; Santoso, 2021). Dengan demikian, PDRB sektoral tidak hanya menjadi indikator kinerja ekonomi daerah, tetapi juga berperan dalam membentuk pola distribusi penduduk.

Hasil penelitian empiris terkait pengaruh PDRB sektoral terhadap urbanisasi menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian yang dilakukan oleh Indra et al. (2023) di Kota Denpasar menunjukkan bahwa PDRB sektoral memiliki pengaruh terhadap urbanisasi, di mana peningkatan nilai tambah ekonomi mampu mendorong keinginan masyarakat untuk berpindah ke wilayah perkotaan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Sumbaga et al. (2023) menunjukkan bahwa PDRB sektoral tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap urbanisasi di Indonesia. Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara PDRB dan urbanisasi bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain.

Selain faktor ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk juga menjadi determinan penting dalam proses urbanisasi. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan, perumahan, serta berbagai fasilitas publik. Dalam kondisi di mana wilayah perdesaan tidak mampu menyediakan peluang ekonomi yang memadai, maka penduduk cenderung melakukan migrasi ke wilayah perkotaan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup (Todaro & Smith, 2020). Fenomena ini menyebabkan terjadinya ekspansi wilayah kota, pertumbuhan permukiman perkotaan, serta perubahan penggunaan lahan secara signifikan (Montgomery, 2018). Penelitian (Abbas & Xinyue, 2025) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan populasi perkotaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi dinamika urbanisasi dan perkembangan ekonomi kota. Namun demikian, penelitian (Fauziah, 2019) menemukan bahwa pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap urbanisasi di Jawa Barat, sehingga menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar wilayah.

Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong urbanisasi karena berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, serta penyediaan berbagai fasilitas ekonomi di suatu wilayah. Peningkatan investasi mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga menarik penduduk dari daerah perdesaan untuk berpindah (Todaro & Smith, 2020). Selain itu, investasi turut berkontribusi dalam meningkatkan daya saing wilayah dan mempercepat pembangunan ekonomi. Distribusi investasi yang tidak merata, di sisi lain, berpotensi menimbulkan ketimpangan antarwilayah serta menyebabkan konsentrasi urbanisasi pada daerah tertentu (Restulillah & Ariusni, 2020). Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Tao yang menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) berpengaruh positif terhadap urbanisasi di negara-negara Asia Tenggara. Namun demikian, hasil penelitian (Risha et al., 2023) memperlihatkan bahwa investasi asing justru memiliki hubungan negatif dengan indeks urbanisasi, sehingga mengindikasikan bahwa pengaruh investasi terhadap urbanisasi tidak selalu bersifat linier.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat urbanisasi yang tinggi di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran Jawa Barat sebagai kawasan penyangga ibu kota serta pusat aktivitas industri dan perdagangan. Urbanisasi di Jawa Barat terus mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, persentase penduduk perkotaan di Jawa Barat diperkirakan mencapai 81,4% pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2025). Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Jawa

Barat telah tinggal di wilayah perkotaan, sehingga menjadikan provinsi ini sebagai salah satu daerah dengan tingkat urbanisasi tertinggi di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta. Tingginya tingkat urbanisasi tersebut mencerminkan bahwa wilayah perkotaan di Jawa Barat telah menjadi pusat aktivitas ekonomi, sosial, dan pembangunan yang memiliki daya tarik kuat bagi penduduk dari wilayah perdesaan.

Urbanisasi di Provinsi Jawa Barat dapat dipahami melalui analisis karakteristik wilayah serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berkembang di dalamnya. Sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, Jawa Barat menunjukkan dinamika wilayah yang kompleks, di mana terjadi interaksi antara dominasi wilayah perdesaan dan pertumbuhan kawasan perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, struktur wilayah di Jawa Barat masih didominasi oleh daerah perdesaan, namun perkembangan wilayah perkotaan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat seiring dengan proses pembangunan ekonomi dan peningkatan aktivitas masyarakat.

Urbanisasi di Provinsi Jawa Barat dapat dipahami melalui perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya perbedaan karakteristik antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Dalam konteks pembangunan wilayah, urbanisasi tidak hanya ditunjukkan oleh perubahan jumlah penduduk yang tinggal di kota, tetapi juga oleh adanya kesenjangan kesejahteraan yang mendorong perpindahan penduduk dari desa ke kota. Oleh karena itu, analisis terhadap indikator sosial ekonomi menjadi penting dalam menjelaskan dinamika urbanisasi di suatu daerah.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi tersebut adalah tingkat kemiskinan menurut wilayah. Data Badan Pusat Statistik

menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 7,19%, lebih rendah dibandingkan wilayah perdesaan yang mencapai 9,30% (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2024). Perbedaan ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki tingkat kesejahteraan yang relatif lebih baik serta peluang ekonomi yang lebih besar dibandingkan wilayah perdesaan. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah yang berpotensi mendorong terjadinya mobilitas penduduk.

Perbandingan tingkat kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat (2025)



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (diolah 2026)

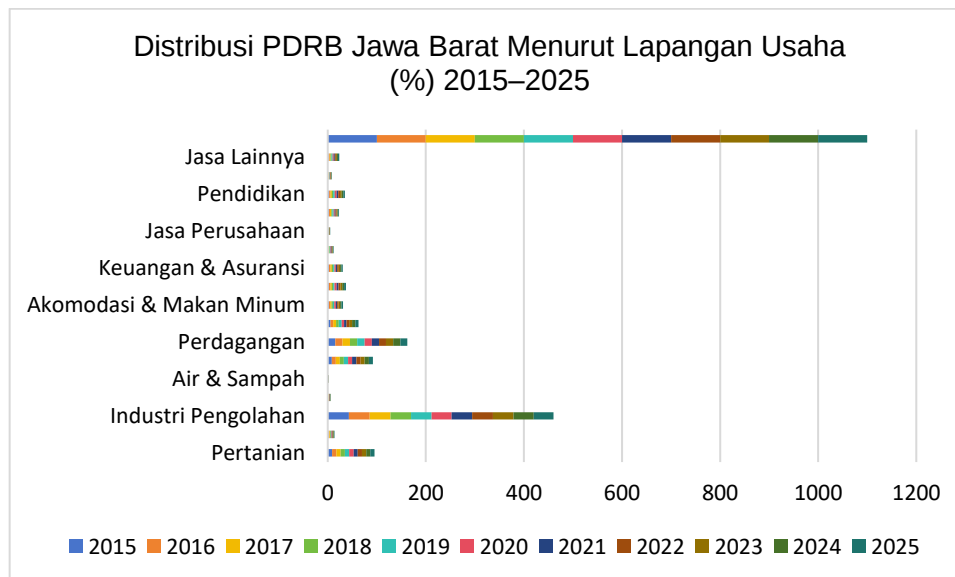
Dari Gambar 1.1 terlihat bahwa tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan antara desa dan kota yang cukup nyata. Wilayah perkotaan dengan tingkat kemiskinan yang lebih rendah cenderung menawarkan akses yang lebih baik terhadap lapangan kerja, pendidikan, serta layanan publik lainnya. Hal tersebut menjadi faktor penarik (*pull factor*) bagi penduduk perdesaan untuk melakukan perpindahan ke wilayah perkotaan. Keterbatasan

peluang ekonomi di wilayah perdesaan, di sisi lain, turut menjadi faktor pendorong (*push factor*) yang mempercepat proses urbanisasi.

Perbedaan kondisi sosial ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu indikator penting dalam menjelaskan proses urbanisasi di Provinsi Jawa Barat. Fenomena ini menunjukkan bahwa urbanisasi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek demografis, tetapi juga oleh faktor struktural seperti ketimpangan pembangunan dan distribusi kesejahteraan antarwilayah. Pemahaman terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi sangat penting dalam menganalisis fakt

Salah satu faktor utama yang memengaruhi urbanisasi adalah kondisi ekonomi daerah yang tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya berdasarkan lapangan usaha. PDRB sektoral menunjukkan sektor mana yang menjadi penggerak utama perekonomian serta memiliki daya tarik terhadap tenaga kerja. Semakin besar kontribusi sektor-sektor produktif, terutama sektor industri dan jasa, maka semakin besar pula peluang kerja yang tersedia, sehingga dapat menarik perpindahan penduduk dari wilayah perdesaan ke perkotaan. Untuk melihat struktur perekonomian tersebut secara lebih rinci, distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat menurut lapangan usaha selama periode penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2 Distribusi PDRB Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha (%) 2015–2025



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (diolah 2026).

Berdasarkan grafik pada Gambar 1.2, struktur perekonomian Provinsi Jawa Barat selama periode 2015–2025 menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan secara konsisten menjadi kontributor terbesar terhadap PDRB, dengan kontribusi di atas 40 persen setiap tahunnya. Meskipun demikian, terlihat adanya tren penurunan secara bertahap dari 43,07% pada tahun 2015 menjadi 40,41% pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan adanya proses diversifikasi ekonomi, di mana sektor lain mulai berkembang dan mengambil peran dalam struktur ekonomi daerah. Sektor perdagangan dan konstruksi juga menunjukkan kontribusi yang cukup stabil sepanjang periode penelitian, masing-masing berada pada kisaran 14–15 persen dan 8 persen. Stabilitas ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut tetap menjadi penopang utama aktivitas ekonomi, khususnya dalam mendukung pertumbuhan kawasan perkotaan melalui pembangunan infrastruktur dan aktivitas distribusi barang dan jasa.

Sektor transportasi serta akomodasi dan makan minum menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, terutama setelah tahun 2020. Sektor transportasi meningkat dari 5,24% pada tahun 2020 menjadi 6,59% pada tahun 2025, sedangkan sektor akomodasi dan makan minum naik dari 2,85% menjadi 3,21%. Peningkatan ini mencerminkan berkembangnya aktivitas mobilitas dan sektor jasa yang erat kaitannya dengan urbanisasi serta pertumbuhan wilayah perkotaan. Sektor informasi dan komunikasi juga mengalami peningkatan dibandingkan periode awal, yang mengindikasikan adanya transformasi menuju ekonomi berbasis digital. Pada saat yang sama, sektor pertanian cenderung stagnan pada kisaran 8–9 persen, sehingga menunjukkan bahwa meskipun masih memiliki peran penting, kontribusinya relatif lebih kecil dibandingkan sektor industri dan jasa.

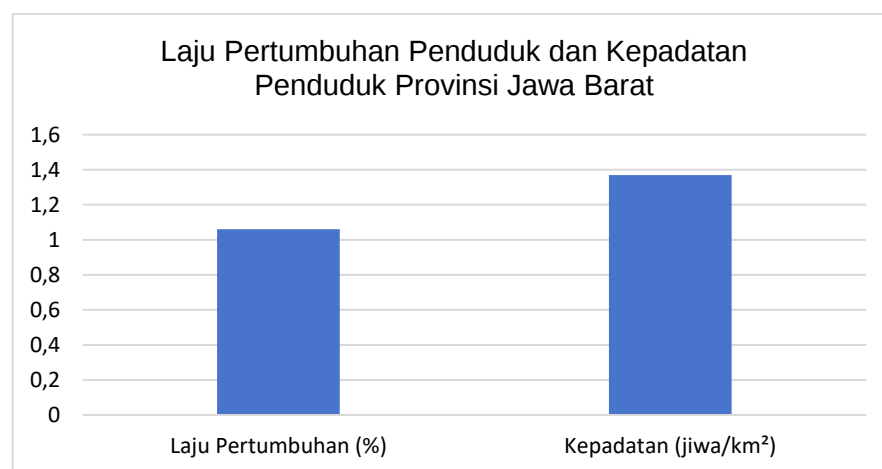
Struktur PDRB Jawa Barat selama periode 2015–2025 mencerminkan pergeseran dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier, yang merupakan karakteristik utama dari proses urbanisasi dan pembangunan ekonomi. Dominasi sektor industri dan meningkatnya peran sektor jasa menunjukkan bahwa Jawa Barat memiliki daya tarik ekonomi yang kuat bagi penduduk, sehingga berpotensi mendorong terjadinya urbanisasi di wilayah tersebut.

Jumlah penduduk merupakan faktor demografis yang memiliki pengaruh besar terhadap urbanisasi. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan terhadap lapangan kerja, perumahan, dan fasilitas publik, sehingga mendorong mobilitas penduduk ke wilayah yang lebih berkembang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2025

mencapai 50.759,0 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,06 persen dan kepadatan penduduk mencapai 1.370 jiwa/km².

Perbandingan jumlah penduduk antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya konsentrasi penduduk yang tidak merata, di mana wilayah perkotaan seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Bandung memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Kabupaten Bekasi tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk tertinggi, diikuti oleh Kota Bekasi dan Kota Bandung, yang mencerminkan tingginya aktivitas ekonomi dan daya tarik kawasan tersebut sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa. Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Kuningan memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih rendah, yang menunjukkan karakteristik wilayah yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan aktivitas ekonomi yang lebih terbatas. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa distribusi penduduk cenderung terpusat di wilayah dengan tingkat pembangunan dan peluang ekonomi yang lebih tinggi, sehingga memperkuat terjadinya urbanisasi di kawasan perkotaan.

Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Jawa Barat (2025)



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (diolah 2026)

Selain itu, jika dilihat lebih rinci pada tingkat kabupaten/kota, konsentrasi penduduk terbesar berada di wilayah perkotaan seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Bandung, yang menunjukkan adanya kecenderungan urbanisasi internal di dalam provinsi. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi penduduk tersebut, jumlah penduduk Jawa Barat menurut kabupaten/kota disajikan pada berikut.

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota (2025)



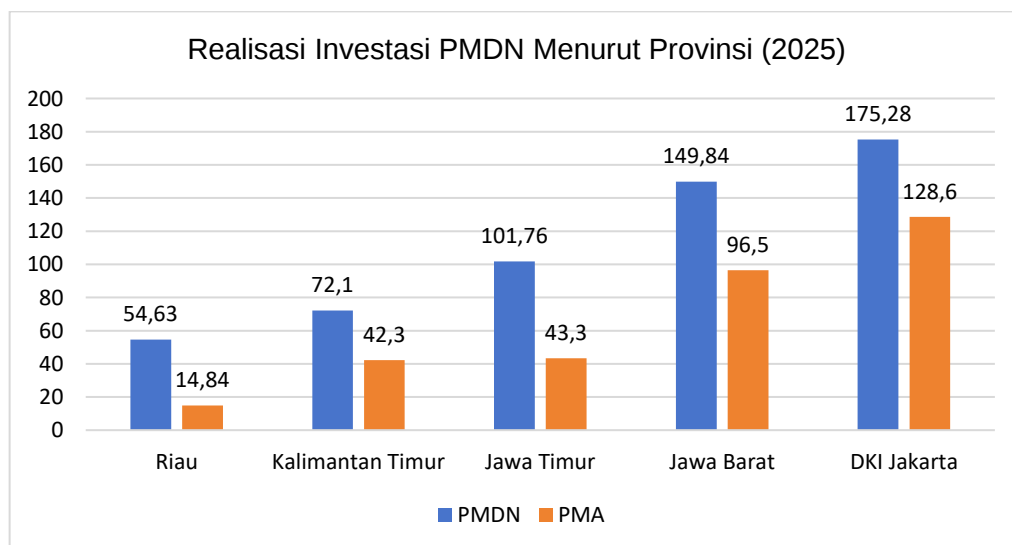
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat (diolah 2026)

Dari Gambar 1.4, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat terlihat terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Bandung. Kondisi ini menunjukkan adanya distribusi penduduk yang tidak merata serta kecenderungan urbanisasi internal dalam provinsi. Konsentrasi tersebut mencerminkan tingginya daya tarik ekonomi, ketersediaan lapangan kerja, serta fasilitas yang lebih lengkap di wilayah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan. Gambaran kondisi investasi yang berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi dan urbanisasi dapat dilihat dari realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di beberapa provinsi. Grafik menunjukkan bahwa realisasi investasi tahun 2025 didominasi oleh

wilayah dengan tingkat industrialisasi tinggi, terutama DKI Jakarta dan Jawa Barat yang mencatat nilai PMDN dan PMA tertinggi.

Jawa Timur berada pada posisi berikutnya dengan kontribusi yang cukup besar, mencerminkan perannya sebagai pusat industri dan perdagangan di kawasan timur Pulau Jawa. Kalimantan Timur dan Riau memiliki tingkat investasi yang relatif lebih rendah, namun tetap signifikan terutama pada sektor berbasis sumber daya alam. Secara keseluruhan, PMDN lebih tinggi dibandingkan PMA di seluruh provinsi, yang menunjukkan bahwa investasi domestik masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah, dengan konsentrasi investasi yang cenderung terpusat di wilayah perkotaan dan kawasan industri maju, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5 Realisasi Investasi PMDN Menurut Provinsi (2025)



Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah 2026).

Setiap provinsi memiliki wilayah penyangga utama yang berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mendorong arus urbanisasi. Di Provinsi Jawa Barat, wilayah Bekasi, Karawang, dan Bogor berfungsi sebagai penyangga utama dengan keunggulan pada sektor industri manufaktur dan permukiman

yang berkembang pesat. Sementara itu, DKI Jakarta didukung oleh kawasan Bodetabek yang meliputi Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai wilayah penyangga dalam penyediaan tenaga kerja, kawasan industri, serta permukiman. Di Provinsi Jawa Timur, kawasan Gerbangkertosusila yang mencakup Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, dan Bangkalan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan dominasi sektor industri dan perdagangan. Di luar Pulau Jawa, Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, serta kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara yang berkembang sebagai pusat industri, pemerintahan, dan jasa. Sementara itu, Provinsi Riau didukung oleh wilayah Dumai, Siak, dan Pelalawan yang berperan dalam sektor industri minyak, gas, dan perkebunan. Keberadaan wilayah penyangga tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antarwilayah dalam memperkuat konsentrasi kegiatan ekonomi, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan investasi dan percepatan urbanisasi.

Tingginya investasi di Jawa Barat menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang dinamis, terutama di sektor industri dan manufaktur, yang berpotensi meningkatkan urbanisasi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, urbanisasi di Jawa Barat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor demografis seperti jumlah penduduk, tetapi juga oleh faktor ekonomi seperti PDRB sektoral dan investasi. Ketiga variabel tersebut saling berkaitan dalam membentuk pola urbanisasi di suatu wilayah.

Berdasarkan latar belakang penelitian, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam kajian urbanisasi di Provinsi Jawa Barat. Urbanisasi mengalami peningkatan seiring dengan berkembangnya aktivitas

ekonomi dan konsentrasi penduduk di wilayah perkotaan. Struktur PDRB Jawa Barat didominasi oleh sektor industri dan jasa yang memiliki daya tarik terhadap tenaga kerja. Hubungan antara PDRB sektoral dan urbanisasi belum menunjukkan hasil yang konsisten dalam penelitian sebelumnya. Jumlah penduduk terus meningkat dengan distribusi yang tidak merata antarwilayah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pemusatan penduduk di kawasan perkotaan.

Selain itu, realisasi investasi di Jawa Barat menunjukkan kecenderungan terpusat di wilayah industri seperti Bekasi, Karawang, dan Bogor. Konsentrasi investasi tersebut berkaitan dengan peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan. Pengaruh investasi terhadap urbanisasi masih menunjukkan perbedaan hasil dalam beberapa penelitian. Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga terjadi pada variabel jumlah penduduk dan PDRB sektoral terhadap urbanisasi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jawa Barat. Permasalahan tersebut memerlukan pengujian lebih lanjut mengenai pengaruh PDRB sektoral, jumlah penduduk, dan investasi terhadap tingkat urbanisasi pada periode 2015–2025.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh PDRB sektoral, jumlah penduduk, dan investasi terhadap tingkat urbanisasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2015–2025 menjadi penting untuk memahami dinamika pembangunan wilayah serta sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil judul penelitian yaitu “Pengaruh PDRB Sektoral, Jumlah Penduduk, dan Investasi terhadap Tingkat Urbanisasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2025”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini jika ditinjau dari latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB sektoral terhadap tingkat urbanisasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 - 2025?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat urbanisasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 - 2025?
3. Bagaimana pengaruh investasi terhadap tingkat urbanisasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 - 2025?
4. Bagaimana pengaruh PDRB sektoral, jumlah penduduk, dan investasi terhadap tingkat urbanisasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 - 2025?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB sektoral terhadap tingkat urbanisasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 - 2025
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat urbanisasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 - 2025
3. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap tingkat urbanisasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 – 2025
4. Untuk mengetahui pengaruh PDRB sektoral, jumlah penduduk, dan investasi terhadap tingkat urbanisasi di Provinsi Jawa Barat tahun 2015 - 2025

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi

pembangunan dan ekonomi regional, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat urbanisasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh PDRB sektoral, jumlah penduduk, dan investasi terhadap tingkat urbanisasi, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah dan pengelolaan urbanisasi yang lebih efektif.

b. Bagi Perencana Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi urbanisasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan wilayah dan pengembangan kawasan perkotaan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai urbanisasi maupun faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan wilayah.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya batasan masalah. Penelitian ini

dibatasi pada analisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektoral, jumlah penduduk, dan investasi terhadap tingkat urbanisasi di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya.

Penelitian ini hanya mencakup periode waktu tahun 2015 hingga 2025, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk periode di luar rentang waktu tersebut. Selain itu, variabel PDRB yang digunakan dibatasi pada PDRB berdasarkan lapangan usaha (sektoral) tanpa membahas secara mendalam masing-masing subsektor secara terperinci. Variabel investasi dalam penelitian ini juga dibatasi pada realisasi investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun yang tersedia dalam data agregat, tanpa membedakan secara rinci jenis investasi lainnya.

Selanjutnya, penelitian ini tidak memasukkan variabel lain yang juga berpotensi memengaruhi urbanisasi, seperti tingkat pendidikan, infrastruktur, kebijakan pemerintah, maupun faktor sosial budaya. Dengan demikian, hasil penelitian ini hanya menggambarkan pengaruh dari variabel yang diteliti dan tidak mencerminkan seluruh faktor yang memengaruhi urbanisasi secara menyeluruh. Selain itu, unit analisis dalam penelitian ini difokuskan pada tingkat provinsi, sehingga tidak membahas secara spesifik perbedaan antar kabupaten/kota di Jawa Barat secara mendalam.